

Peran Bidang Jalan Dinas Pupr Aceh Barat Dalam Penanganan Dan Pembangunan Jalan Di kabupaten Aceh Barat

Rahmad ilham¹⁾, Andi Yusra²⁾, Astiah Amir³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Teuku Umar,
Meulaboh, 23615, Indonesia

Email : rahmadilham.2109@gmail.com, andiyusra@utu.ac.id, astiahamir@utu.ac.id

Abstrak

Penanganan & Pembangunan jalan pada Kabupaten Aceh Barat memerlukan kiprah pemerintah pada perencanaan pembangunan jalan yg akan dilakukan pada daerah, melalui Bidang Program Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini buat mengetahui sejauh mana kiprah Bidang Program Dinas PUPR pada perencanaan pembangunan jalan pada lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam penelitian ini memakai metode naratif kualitatif menggunakan mendeskripsikan obyek yg pada teliti berupa output wawancara pihak terkait pada lapangan. Dari output penelitian ini pada dapatkan bahwa Bidang Progarms Dinas PUPR sudah melaksanakan kiprahnya pada pembangunan jalan pada lingkup Kabupaten Aceh Barat. Melalui beberapa tahapan yaitu menerima usulan berdasarkan rakyat, diteruskan ke instansi-instansi terkait mencakup Kepala Desa, Camat, & Bupati, kemudian ke Dinas PUPR. Melalui penilaian & seleksi output Musrenbang sebagai akibatnya diperoleh bahwasanya pada kemajuan suatu daerah pembangunan Infrastruktur sangat perlu buat diperhatikan sang pemerintah, lantaran hal ini sangat krusial buat menaikkan akses rakyat dalam pelayanan dasar & buat menaikkan produktivitas dan daya saing, pembangunan infrastruktur pula berpotensi menaruh kontribusi dalam pemulihan ekonomi yg lebih bertenaga dan sangat krusial buat mengatasi perubahan iklim terlebih primer yaitu jalan, jalan adalah akses primer yang harus dilaksanakan sang karena itu jalan sebagai prioritas pada acara perencanaan pekerjaan.

Kata kunci : *Dinas PUPR, jalan, penanganan, pembangunan.*

1. Pendahuluan

Dalam pembangunan daerah diperlukan suatu cara yang paripurna & sesuai dari aspek pendanaan & cara yang efektif dari aspek hasil. Dalam melakukan perencanaan pembangunan pemilihan cara yang paripurna menjadi begitu penting agar bisa mengetahui bagaimana peran pemerintah & rakyat, menjadi akibatnya keduanya bisa bekerja secara sinergis & optimal[1]. Perencanaan pembangunan suatu daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mana mengacu pada sistem bottom up, yaitu perencanaan yang dari pada kebutuhan masyarakat memakai berbagai persetujuan yang dalam hadapi dalam mengambil suatu putusan & pemerintah sebagai fasilitator pelaksanaannya. Dinas PUPR merupakan suatu perangkat daerah yang dalam berikan tugas & wewenang & tanggung jawab untuk menjalankan tugas daerah dalam lingkup pekerjaan generik & penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR) Aceh Barat melalui bidang program adalah galat satu susunan organisasi DPUPR yang membawahi seksi penyusunan program & pengawasan, seksi data, penilaian & pelaporan, & seksi pengujian mutu. Bidang program memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan sebagai suatu pihak yang menjadi pelaksana & pengontrol pekerjaan pembangunan jalan dalam wilayah nya. Seiring menggunakan kemajuan zaman yg menuntut pemerintah pada perkembangan kiprah & fungsi

pemerintah, buat itu perlu dilakukakannya pemaksimalan kiprah dan fungsi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembentukan susunan organisasi guna menaruh pelayanan pada rakyat sinkron menggunakan tugas & bagian nya masing-masing.

Kerangka Teori Dasar

Perencanaan merupakan suatu kegiatan mempersiapkan melalui perumusan & penetapan suatu keputusan tentang tahapan menuntaskan suatu perseteruan dalam pekerjaan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan. Pembangunan merupakan galat satu usaha dalam menumbuhkan & memberikan perubahan yang telah terencana. Pembangunan memiliki tujuan mempertinggi kesejahteraan warga Selain itu, pembangunan merupakan suatu proses menyebarkan kapasitas warga dalam jangka panjang menjadi akibatnya dalam perlukan suatu perencanaan yang sempurna & akurat[3]. Jalan merupakan suatu sarana transportasi yang memiliki fungsi sebagai penggerak pembangunan suatu wilayah, & sanggup ditentukan & menghipnotis beberapa sektor berupa perdagangan, loka industri pemukiman & pemerintahan. Maka berdasarkan itu dalam urusan pembangunan jalan Bidang Program memiliki peran penting dalam dalam suatu perencanaan pembangunan jalan pada suatu wilayah. Dengan adanya pembangunan jalan dalam dalam suatu wilayah atau desa maka akan menjamin peningkatan perekonomian & pendidikan yang lebih baik lagi bagi masyarakatnya. Dengan memperhatikan visi & misi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maka pada tetapkam visi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat menjadi berikut :**“Terciptanya Infrastruktur Pekerjaan Umum yg Handal Dalam Mendukung Aceh Barat yg Makmur Sehat & Berwawasan Lingkungan menggunakan Memperhatikan Dampak Risiko Berencana”**

Adapun misi dari DPUPR Kabupaten Aceh Barat yaitu :

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur kawasan strategis. Daerah tertinggal dan perbatasan serta penanganan kawasan rawan bencana guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- b) Mewujudkan jaringan jalan kabupaten yang berkelanjutan dengan mobilitas aksesibilitas dan keselamatan yang andal untuk melayani pusat-pusat kegiatan wilayah dan kawasan strategi daerah.
- c) Mengintegrasikan pembangunan konstruksi pekerjaan umum yang infrastruktur pekerjaan umum yang berdasar pada penataan ruang dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d) Meningkatkan saran dan prasarana sumber daya air secara efisien, handal, berkualitas, aman dan berwawasan lingkungan.
- e) Mewujudkan kelancaran tata laksana administrasi perkantorn dan pengembangan sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas sumber daya jasa konstruksi[4].

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian ialah manusia yaitu sebagai pelaku dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ialah metode yang berusaha menafsirkan obyek penelitian menurut situasi yang terjadi dalam lapangan.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat, yg terletak pada jalan sisingamangaraja lorong BKKBN kota meulaboh & yg sebagai focus penelitian yaitu dalam Bidang Jalan yg mempunyai tugas & kiprah pada perencanaan pembangunan infrastruktur & perencanaan pembiayaan pembangunan.

2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan buat mengetahui kiprah & tahapan yg dilakukan sang Bidang Jalan pada Dinas PUPR pada Pembangunan dan penanganan Jalan pada Kabupaten Aceh Barat, sebagai akibatnya sebagai bahan penilaian & kontrol aktivitas guna meminimalisir ketidakpastian dan pemborosan biaya.

2.4 Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahapan yg dipakai berupa aktivitas wawancara & melakukan analisis dokumen (catatan juga arsip) berikut tahapan yg dilakukan pada penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu bertemunya 2 orang atau lebih menjadi narasumber yg menaruh liputan terkait penekanan penelitian guna mengetahui sejauh mana kiprah bidang jalan pada merencanakan pembangunan suatu wilayah. Adapun narasumber yg sebagai objek yg pada wawancara berjumlah 10 orang yg terdiri berdasarkan ketua bidang jalan, para KASI dan beberapa staf lapangan.

b. Analisis dokumen, pada penelitian ini dokumen digunakan menjadi media buat menggali liputan. Data yg dipakai pada penelitian ini berupa data utama yg terdiri berdasarkan output survey, & data sekunder yg terdiri berdasarkan laporan output aktivitas musyawarah rencana pembangunan kecamatan & musyawarah rencana pembangunan kabupaten.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahapan awal menurut perencanaan pembangunan yang terdiri menurut pembangunan jalan, jembatan, irigasi, & drainase dalam mulai menurut desa, kelurahan, & dalam sepakatilah usulan-usulan pembangunan pada Musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, hasil menurut Musyawarah rencana pembangunan tingkat desa lalu dalam usulkan ke Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan & hasil menurut Musyawarah tingkat Kecamatan inilah yang akan menjadi usulan pembangunan tingkat Kabupaten. Musyawarah rencana pembangunan dalam Kabupaten memiliki tujuan untuk melakukan sinkronisasi menurut hasil usulan warga melalui musyawarah planning pembangunan Kecamatan memakai penentuan skala prioritas menurut setiap kegiatan.

Dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan jalan Kabupaten kemudian diajukan ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan) oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang & hasil keputusan tersebut dalam sampaikan dalam panitian anggaran, yang terdiri menurut (a) Sekretaris Daerah, (b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (c) Penyusun Program yaitu Dinas PUPR. Hasil menurut keputusan tersebut kemudian dalam pilih program yang menjadi prioritas untuk dalam ajukan oleh sekretaris daerah dalam DPR guna mendapat penetapan & pengesahan sebuah anggaran oleh DPRD[2].

Strategi Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat dalam pembangunan Ring Road jalan hitam (Aspal) mulai menurut dalam kota sampai ke pendesaan menjadi prioritas pemerintah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dalam dukung oleh Dinas terkait contohnya Dinas PUPR Aceh Barat, program ini juga merupakan suatu pelayanan umum yang akan dirasakan langsung oleh warga karena jalan merupakan akses utama dalam warga beraktivitas sehari-hari[5].

Penyusunan rencana strategi kegiatan melalui Dinas PUPR, merupakan rincian kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Dinas PUPR Aceh Barat berfungsi untuk membantu Pemprov jua Pemda pada bidang penyediaan & pemeliharaan sarana jua prasarana bidang PUPR. Sarana & prasarana tersebut mampu digunakan oleh seluruh masyarakat dalam meningkatkan aktivitas sehari-harinya, jua dalam penyebaran pembangunan dalam menaikkan taraf biologi nyaman & kesejaheraannya.

Dalam perencanaan pembangunan jalan, warga juga dilibatkan dalam anugerah usulanusulan ataupun pandangan baru dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat juga terlibat dalam rangka untuk menerima usulan-usulan yang diberikan oleh RT, Kelurahan, Kecamatan, & Kabupaten lalu hasil menurut musyawarah tersebut disusun menjadi sebuah perencanaan pembangunan yang akan dalam kerjakan. Lalu menurut rencana tadi Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat mengajukan dalam badan perencanaan pembangunan daerah. badan perencanaan pembangunan daerah juga terlibat dalam membahas perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, pembahasan tersebut melibatkan sekretaris daerah. Setelah pembahasan selesai dalam bahas & dalam dapatkan sebuah kesepakatan maka Langkah selanjutnya berupa penyerahan perencanaan pembangunan dalam pemerintah untuk mendapat penetapan & pengesahan anggaran. Dari hasil penelitian & hasil wawancara dalam dapatkan bahwa nisbi banyak desa yang berada dalam Kabupaten Aceh Barat mengusulkan perseteruan yang terdapat dalam desa. Meskipun demikian prioritas kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing desa berbeda. Dan lebih menurut itu mampu diketahui juga bahwasanya banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh warga lebih men terdapatitik beratkan pada hal-hal yang bersifat urgent yaitu menyangkut kebutuhan biologi sehari-hari.

Suatu pembangunan yang akan dalam melaksanakan wajib melalui tahapan yang telah dalam lebih dulu agar bisa dalam ketahui berapa using waktu yang akan dalam perlukan dalam menyelesaikan pembangunan jalan tersebut, & semua aktivitas yang berada dalam dalamnya termasuk proses perencanaan pembangunan. Para perencana berusaha menemukan teknik yg bisa menaikkan kualitas perencanaan dalam menghadapi banyak sekali aktivitas pembangunan yg kian meningkat, dalam antaranya memakai membentuk planning yg tepat. Berkaitan memakai perencanaan pembangunan jalan diawali memakai Menyusun rencana anggaran porto yang berarti bahwa DPUPR melalui bidang program melakukan perencanaan dalam membiayai pembangunan jalan yang bersumber menurut anggaran APBN yang merupakan rencana anggaran pemerintah per tahunnya yang dalam diskusikan & dalam sah kan oleh pemerintah daerah itu sendiri & ditetapkan dalam peraturan No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4578), Selanjutnya penyediaan fasilitas pelengkap oleh Dinas PUPR, & dukungan menurut pemerintah berupa pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Pihak yang berkaitan dalam aktivitas merencanakan porto pembangunan jalan tersebut ialah : Pemerintah, DPUPR, jawatan (khusus bangunan negara), Konsultan, Kontraktor, & instansi lainnya

4. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Kegiatan perencanaan pembangunan & penanganan jalan mencakup aktivitas perencanaan & pembiayaan bangunan jalan yg pada lakukan sang Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat melalui Musyawarah planning pembangunan menggunakan banyak sekali instansi yg terlibat misalnya sekretaris daerah, DPR, DPRD, BAPPEDA & lainnya. Setelah termin-termin tadi pada lakukan & disetujui sang pihak penyelenggara, maka perencanaan yg pada rencanakan akan segera dimulai Selanjutnya melakukan planning aturan pembangunan jalan yg disusun pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada antaranya berdasarkan aturan APBN, APBD, DTU, donasi berdasarkan sentra & berdasarkan perusahaan swasta, Dinas PUPR Kontraktor, dan instansi lainnya. Penyelenggaraan pembangunan jalan dilaksanakan melalui aktivitas pemeliharaan jalan sang Dinas PUPR berupa pekerjaan perbaikan jalan menggunakan aktivitas serak kerikil dan menaikkan jalan melalui pekerjssn pelebaran jalan. Kemudian kendala yg dilewati Dinas PUPR pada menjalankan kiprahnya yaitu pencairan aturan yg terhambat dan adanya faktor cuaca.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat tetap aktif dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur karena dalam pembangunan ini masyarakat merupakan tokoh utama dalam keberhasilan suatu pembangunan.
2. Perlu adanya peningkatan mutu padan penyiapan dan perkerasan badan jalan agar tercapai tujuan pembangunan jalan yang memberikan rasa nyaman dan aman.
3. Perlu adanya perhatian khusus agar kegiatan pembangunan jalan dapat berjalan maksimal.

Daftar Kepustakaan

C. Hermawan, B. Laporan, S. Informasi und P. Regional, „Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Pengendalian Banjir di Desa Sidodadi Kecamatan”, *eJournal of Government Science*, vol. 7, Nr. 1, p. 465–478, 2019.

DPUPR, *Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat*. 2022.

N. E. Purnama, E. Resmawan, dan Budiman, “Peran dinas pekerjaan umum dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur,” *Ilmu Pemerintah.*, vol. 6 (1), no. 1, hal. 487–500, 2018.

M. Ashari, “Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013) (An Analysis Of Regional Development Planning In North Lombok Regency : A Case Study Of Participatory Planning From 2009-2013),” *J. Ekon. dan Kebijak. Publik*, vol. 6, no. 6, hal. 163–180, 2015.

Makmur, *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.